

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah merupakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilan sebagai bahan evaluasi untuk dimasa yang akan datang.¹ Dalam pengelolaan laporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian suatu entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan juga merupakan suatu cerminan yang dapat mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu Pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan digunakan untuk dapat mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas

¹ Nanda Saputri Yanti, Anwar Made, and Supami Wahyu Setiyowati, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8, No. 1 (May 25, 2020): 8, <https://doi.org/10.21067/Jrma.V8i1.4455>.

pelaporan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas atau yang memenuhi karakteristik kualitatif serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan diperlukan kompetensi sumber daya manusia. Laporan keuangan berdasarkan standart akuntansi Pemerintah merupakan media yang digunakan oleh entitas dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan.²

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas selama satu periode pelaporan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan.³ Dalam penyusunan laporan keuangan pada kantor Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Pamekasan, dengan adanya pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer harus dikerjakan oleh pegawai yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

² Yunita Eriyanti Pakpahan, "Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja usaha umkm," *AKUNTABEL* 17, no. 2 (September 30, 2020): 262, <https://doi.org/10.29264/jakt.v17i2.8222>.

³ Riswan Riswan and Yolanda Fatrecia Kesuma, "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (March 31, 2015): 95, <https://doi.org/10.36448/jak.v5i1.449>.

Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia. Pengelolaan keuangan daerah harus diikuti dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten. Kualitas sumber daya manusia yang minim akan mengakibatkan fatal terhadap kualitas laporan keuangan untuk kedepannya. Sehingga perlu adanya upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan adanya pelatihan penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas laporan keuangan dapat dilihat juga apabila telah disusun dengan Standart Akuntansi Pemerinta (SAP), disusun melalui sistem akuntansi Pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Karakteristik kualitatif laporan keuangan Pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat

⁴ Putriasri Pujanira and Abdullah Taman, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 6, No. 2 (October 29, 2017): 15, <https://doi.org/10.21831/Nominal.V6i2.16643>.

dipahami. Fenomena pelaporan keuangan Pemerintah daerah merupakan sesuatu yang sangat menari untuk dikaji lebih lanjut.⁵

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standart akuntansi pemerintah. “Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan pegawai atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*), indikator pengukurannya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap”.⁶

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini dengan adanya kompetensi sumber daya manusia bisa mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya dan memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya komeptensi sumber daya manusia bisa mendorong terwujudnya laporan keuangan yang bekualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan. Informasi yang terdapat didalam laporan keuangan Pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik yang telah ditetapkan dala peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan karakteristik kualitatif laporan

⁵ Di Akses Dari <https://Accurate.Id/Akuntansi/Karakteristik-Kualitatif-Laporan-Keuangan/> Diakses Pada Tanggal 05 Agustus 2021.

⁶ Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, and Astrid Maharani, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan,” *International Journal Of Social Science And Business* 3, No. 2 (May 22, 2019): 70, <https://doi.org/10.23887/ijssb.V3i2.17579>.

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.⁷ Laporan yang berkualitas harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam Standart Akuntansi Pemerinta (SAP).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi pemerintahan pada khususnya mempunyai peran yang cukup penting dalam penyusunan laporan keuangan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan juga berpengaruh pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Karena Pada dasarnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya memperoleh penilaian berupa opini dari badan pemeriksaan keuangan (BPK).⁸

Salah satu upaya dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi Pemerintah yang diterima secara umum. Akuntansi Pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntansi publik. Transparansi pelaporan keuangan

⁷ Febrian Cahyo Pradono and Basukianto, "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 22, no. 2 (2015): 189, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4117>.

⁸ Dahlia. "Pengaruh Kompetensi SDM dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol. II No. 1, (Juli 2016), Hlm. 7

mengharuskan suatu organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang biasa kepada pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep keterandalan dimana informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung. Dengan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat digunakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap instansi Pemerintah atau sebuah organisasi yang bersangkutan. Dalam kerangka kebebasan pers dan upaya menciptakan informasi yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-undang tersebut, berbagai masalah mengenai transparansi informasi khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.⁹ Menurut standar Akuntansi Pemerintah dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menyebutkan bahwa transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan kepentingan masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka.

⁹ Farid Hamid dan Heri Budiono, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 331.

Pertama, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD wilayah Kabupaten Tangerang), membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian yang berjudul Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan, membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan LKPD Kabupaten Klungkung.¹¹ *Kedua*, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan, membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif atau signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.¹² Sedangkan dalam penelitian yang berjudul Pengaruh kompetensi SDM, akuntabilitas, transparansi dan penerapan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada pemerintahan

¹⁰ Rama Ardianto and Chermian Eforis, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Bina Akuntansi* 6, No. 1 (January 31, 2019): 130.

¹¹ "Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan | E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana," 409, Accessed May 27, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/22586>.

¹² Zefri Maulana And Nasrul Kahfi Lubis, "Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)* 4, No. 1 (October 11, 2020): 9, <https://doi.org/10.33060/jensi.v4i1.2660>.

Provinsi Kepulauan Riau), membuktikan bahwa Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.¹³

Pemilihan salah satu OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Pamekasan sebagai Objek penelitian, dikarenakan Kabupaten Pamekasan dinilai cukup berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mengalami peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut yaitu pada tahun 2014 hingga tahun 2020 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sebelumnya pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP). Dibanding dari tiga Kabupaten lainnya di Pulau Madura, keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut tentang laporan keuangan termasuk paling baik, meskipun ketiga Kabupaten tersebut sama-sama meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 tersebut. Hal ini terjadi, karena Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih ketiga Kabupaten lain di Pulau Madura tersebut, yakni Bangkalan, Sampang dan Sumenep lebih sedikit.¹⁴

¹³ “Pengaruh Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (S,” 17, accessed June 5, 2021, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9O8IQRhVxwEJ:jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/02/JURNAL-Rendy.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id.

¹⁴ Diakses dari <https://Pamekasanhebat.com/2020/10/21/laporan-keuangan-pemkab-Pamekasan-raih-predikat-wtp/> pada tanggal 20 November 2020 pukul 10.17 WIB.

Hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan itu sendiri berkaitan erat. Kompetensi sumber daya manusia sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Semakin buruk kompetensi sumberdaya manusia tersebut memungkinkan untuk menentukan kualitas laporan keuangan, sebaliknya semakin baik kompetensi sumber daya manusia tersebut bisa dikatakan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Transparansi dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

Merujuk pada paparan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, antara lain:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana bentuk transparansi di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan?
4. Apakah transparansi bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bentuk transparansi di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.
4. Untuk mengetahui apakah transparansi bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat terhadap beberapa pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur-literatur maupun penelitian di bidang akuntansi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai analisis kompetensi sumber daya manusia dan transparansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pikiran untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya di bidang keuangan agar bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.

c. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan wawasan yang luas bagi para mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa lainnya dalam melakukan penelitian.

d. Bagi Kantor Sekretariat DPRD

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang positif bagi instansi tersebut, dan menjadi salah satu bahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan selanjutnya agar menjadi instansi pemerintahan yang lebih baik.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelasnya makna. Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya seseorang yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

2. Transparansi

Transparansi adalah memberikan sebuah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹⁵

3. Laporan Keuangan

Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan): Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam

¹⁵ “Pengaruh Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (S,” 5.

berbagai cara seperti misalnya: laporan arus kas (dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.¹⁶

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Adanya kajian terdahulu yaitu untuk memebrikan kerangka kajian empiris dan teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan tema peneliti. Adapun kajian terdahulu yang di angkat yaitu:

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1	Rendy Ermino (2017)	Pengaruh kompetensi SDM, akuntabilitas, transparansi dan penerapan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau)	Metode yang digunakan yaitu metode Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian dilakukan pada tahun 2017.	Menganalisis tentang kompetensi SDM dan transapransi terhadap kualitas laporan keuangan.	penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM, akuntabilitas, transparansi dan penerapan sistem akuntansi secara simultan berpengaruh positif atau signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. ¹⁷
2	Rizki Afri Mulia (2018)	Analisis Faktor-faktor yang	Metode Penelitian Kuantitatif,	Berisi tentang faktor-faktor yang	Terdapat pengaruh positif dan

¹⁶ Aldila Septiana, *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 2.

¹⁷ "Pengaruh Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi Dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (S.)"

		Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)	Objek Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Afri Mulia yaitu Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kantor Kabupaten Pamekasan. Tahun penelitian 2018.	mempengaruh i kualitas laporan kuangan daerah	signifikan antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah kabupaten Pasamaan Barat. Terdapat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pasamaan Barat. ¹⁸
3	Fitri Mariana Tampubolon dan Ahmad Basid (2019)	Pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah (studi empiris pada	Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel yang digunakan yaitu pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel X2. Tempat penelitian yang	Menganalisis tentang kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di DKI Jakarta. ¹⁹

¹⁸ Rizki Afri Mulia, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)," *Jurnal EL-RIYASAH* 9, no. 1 (March 12, 2019): 7, <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798>.

¹⁹ Tampubolon and Hasibuan, "Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah."

		Pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta)	digunakan yaitu Pemerintah daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tahun penelitian 2019.		
4	Maria Kaok (2021)	Analisis Komitmen Organisasi dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Metode yang digunakan yaitu Kuantitatif. Tempat penelitiannya terdapat di Kantor Distrik Kaptel Kabupaten Marauke. Tahun penelitian 2021.	Menganalisis tentang kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.	Terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan kantor Distrik Kaptel Kabupaten Marauke. ²⁰

Sumber: data diolah dari kajian penelitian terdahulu

²⁰ Maria Kaok, "Analisis Komitmen Organisasi Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *Forum Ekonomi* 23, no. 4 (November 30, 2021): 748–54, <https://doi.org/10.29264/jfor.v23i4.10091>.